

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Strategi merupakan sebuah cara yang disusun secara sistematis dan terstruktur untuk mendapatkan suatu tujuan.¹ Dalam kehidupan berpolitik selalu membutuhkan strategi yang matang untuk mencapai suatu kepentingan. Artinya, strategi politik ialah ilmu tentang taktik atau cara yang dikelola oleh politisi untuk menggapai kekuasaan dan mempertahankan sumber-sumber kekuasaan berdasarkan keputusan politik yang sesuai keinginan.

Strategi politik seringkali digunakan untuk merealisasikan cita-cita politik. Seperti pemberlakuan aturan baru, pembentukan struktur baru dalam tatanan pemerintahan atau dilaksanakannya program deregulasi, privatisasi, atau desentralisasi.² Sebagai seorang politisi, ia bertanggung jawab atas kondisi sosial yang diciptakan ketika tidak menggunakan strategi yang tepat sehingga berdampak pada jutaan manusia yang menderita.

Salah satu cara untuk mendapatkan kekuasaan melalui politik dengan menggunakan instrumen partai politik agar lebih memudahkan menggaet pemilih. Selain itu, cara yang senantiasa dilakukan ialah memberikan janji kepada seluruh masyarakat. Janji tersebut pun bisa berupa mengubah fenomena sosial kearah yang lebih baik maupun berupa produk kebijakan yang akan dibuat.

¹ Tim Prima Pena, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Gitamedia Press, 2006).

² Peter Schröder, *Strategi Politik*, Edisi revi. (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung für die Freiheit, 2008).

Pemilu di Korea Selatan yang berlangsung pada tahun 2022, salah satu calon kandidat menggunakan strategi kampanye anti-feminisme untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat laki-laki. Kampanye yang dilakukan pun menuai pertentangan yang dari kaum-kaum feminis di Korea Selatan. Kampanye tersebut menjadi sorotan publik terkhusus para kaum feminis di Korea Selatan karena akan memperparah kesetaraan gender di Korea Selatan. Hal ini menyebabkan banyak kasus ketidakadilan gender dalam bentuk subordinasi, marginalisasi, atau stereotipe dimana perempuan menjadi korban paling banyak atas kasus ini.³ Ketidaksetaraan gender bisa memberikan dampak buruk terhadap suatu negara apabila tidak bisa ditangani, sehingga urgensi dari kesetaraan gender selain untuk menegakan Hak Asasi Manusia tetapi kesetaraan gender harus diwujudkan untuk membangun kehidupan yang damai, sejahtera, dan berkelanjutan.⁴ Namun pada kenyataannya, ketimpangan gender masih banyak terjadi seperti peristiwa di Korea Selatan. Meskipun pemerintahan Korea Selatan menghargai hak politik, hak sipil, atau hak ekonomi tetapi pemerintahan Korea Selatan belum bisa keluar dari jeratan diskriminasi gender.⁵

Berdasarkan data yang dilansir oleh *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) perempuan Korea Selatan yang termasuk ke

³ Dr. Akhyar Yusuf Lubis, 2016, *Pemikiran Kritis Kontemporer: Dari Teori Kritis, Culture Studies, Feminisme, Postkolonial Hingga Multikulturalisme*, Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, hal. 107

⁴ Save The Children, *Gender Discrimination: Inequality Starts in Childhood*, diakses dalam <https://www.savethechildren.org/us/charity-stories/how-gender-discrimination-impacts-boys-and-girls#:~:text=Gender%20inequality%20is%20discrimination%20on,violated%20by%20gender%20based%20discrimination.> (30/03/2022, 13.00 WIB)

⁵ Human Rights Watch, *South Korea Events of 2020*, diakses dalam https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.hrw.org/world-report/2021/country-chapters/south-korea&ved=2ahUKEwiX8LmWnfP2AhVI73MBHZh1CYI4FBAWegQICRAB&usq=AOvVaw3rDnhgL_jFDMcbxml6pArd (30/03/2022, 15.57 WIB)

dalam angkatan kerja hanya sekitar 55% dari rentang umur 15-64 tahun dari 64% rata-rata angkatan kerja untuk negara OECD. Bahkan ketertinggalan perempuan dalam lapangan kerja mencapai 77% lebih tinggi daripada laki-laki di Korea Selatan.⁶ Pada tahun 2011, ketimpangan gender di Korea Selatan juga bisa dilihat dari pendidikan dengan laki-laki lebih tereduksi 88,3% daripada perempuan yang hanya mendapatkan edukasi di bangku sekolah tinggi sebesar 62,9% sehingga dengan adanya perbedaan ini membuat resah karena bisa mendorong terjadinya penyalahgunaan sumber daya manusia di perekonomian Korea Selatan.⁷ Pada aspek politik ketimpangan gender pun marak terjadi di Korea Selatan, partisipasi perempuan di politik dan pemerintahan pada tahun 1992 partisipasi perempuan hanya 1% atau sekitar 3 orang dari 299 kursi yang tersedia untuk mengisi jabatan sebagai anggota Majelis Nasional ke-14, kemudian di tahun 2008 terdapat 41 perempuan dari 299 kursi yang berhasil menjabat sebagai anggota Majelis Nasional ke-18.⁸ Hingga saat ini pun partisipasi perempuan dalam politik Korea Selatan hanya 19% atau 55 orang sebagai Majelis Nasional dari 295 kursi yang disediakan.⁹

Tidak hanya itu, ancaman kekerasan berbasis gender terhadap perempuan juga rentan terjadi di Korea Selatan. Penyalahgunaan wewenang yang berujung

⁶ Jinyoung Kim, Jong-Wha Lee, and Kwanho Shin, *Impact of Gender Inequality on The Republic of Korea's Long-Term Economic Growth: An Application of The Theoretical Model of Gender Inequality and Economic Growth*, ADB Economics Working Paper No. 473, Januari 2016, hal 1. Diakses dalam <https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://www.adb.org/sites/default/files/publication/179689/ewp-473.pdf&ved=2ahUKEwjyJLxpfP2AhXyjuYKHeB1BEw4ChAWegQICxAB&usg=AOvVaw3mzrO7LfGz-0CNej9UMMWv> (30/03/2022, 16.00 WIB)

⁷ Ibid, hal.4

⁸ Ibid, hal. 6-7

⁹ *Gender Quotas Database Republic of Korea*, Internasional Institute for Democracy And Electoral Assistance, diakses dalam <https://www.idea.int/data-tools/data/gender-quotas/country-view/163/35> (30/03/2022, 18.14 WIB)

pada kasus pelecehan seksual terjadi di ruang lingkup militer dimana seorang perempuan Angkatan Udara mengakhiri hidupnya setelah dikuntit dan dianiaya oleh atasannya.¹⁰ Tidak hanya itu, didukung dengan pesatnya teknologi, perempuan di dalam dunia maya juga tidak terjamin karena terdapat kekerasan berbasis gender online yang menempatkan anak-anak atau perempuan sebagai korban dari kejahatan tersebut. Pada tahun 2008, terdapat 4% kasus tuntutan kejahatan seksual di Korea Selatan tentang pembuatan film ilegal. Di tahun 2017 kasus seperti itu meningkat sebelas kali lipat dari 585 kasus menjadi 6.615 kasus dengan motif *spycam* atau merekam secara diam-diam di ruang ganti, toilet, atau hotel kemudian diperjual belikan. Pada 2019, kasus kekerasan digital mencapai 43,5% daripada kasus pembunuhan dengan 27,7% dan kasus perampokan sebanyak 19%. Sampai pada tahun 2020, hukuman ringan sudah dijatuhkan oleh pelaku kekerasan digital.¹¹

Salah satu calon kandidat pada pilpres 2022 di Korea Selatan diidentifikasi sebagai seorang yang anti-feminis. Hal ini didukung dari pernyataannya langsung ketika dimintai pendapat mengenai isu domestik yang terjadi. Meskipun awalnya menyampaikan mendukung orang-orang feminis akan tetapi pernyataan tersebut ditarik kembali.

Dalam wawancara tersebut ia mengatakan:

¹⁰ *Amnesty Internasional Report 2021/22: South Korea, republic of Korea Head of state and government: Moon Jae-in, Amnesty Internaitonal, diakses dalam <https://www.amnesty.org/en/location/asia-and-the-pacific/east-asia/south-korea/report-korea-republic-of/> (31/03/2022, 01.02 WIB)*

¹¹ *South Korea: Internet Sexual Images Ruin Women's Lives Government Response to Digital Sex Crimes Inadequate, Human Rights Watch, diakses dalam <https://www.hrw.org/news/2021/06/15/south-korea-internet-sexual-images-ruin-womens-lives> (31/03/2022, 10.25 WIB)*

“I think there are many different ways to interpret feminism. Feminism is a form of humanism, recognizing that gender discrimination and inequality is a reality and it is a movement to correct that. In that sense, I consider myself a feminist”¹²

Yoon mengatakan bahwa hal tersebut merupakan kesalahan editor dan administrasi yang keliru. Hal tersebut merupakan indikasi bahwa konflik gender bagi politisi menjadikan kesempatan untuk meraih suara dari kalangan pemuda-pemudi. Janji kampanye Yoo ketika terpilih akan menghapuskan Kementerian Keluarga dan Perempuan karena dirasa merugikan bagi kaum laki-laki.¹³ Yoon Suk-Yeol juga menggunakan kampanye anti-feminisme untuk menarik suara dari masyarakat yang masih menganggap bahwa feminisme merupakan tindakan membenci laki-laki.¹⁴ Keinginan Yoon Suk-Yeol untuk menghapus Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga juga mendapatkan banyak respon dari masyarakat atau pejuang kesetaraan gender di Korea Selatan. Karena berdasarkan fungsinya kementerian tersebut banyak membantu berbagai program perempuan seperti menyintas kejahatan seksual, buruh perempuan dan migran, stigmatisasi ibu tunggal dan memperjuangkan hukum keluarga. Sehingga dengan terlaksananya pemilu yang memenangkan presiden dari golongan konservatif tersebut

¹² Michelle Ye Hee Lee Min Joo Kim, “The Men Who Should Be South Korea’s Next Presiden,” *The Washington Post*, last modified 2022, accessed September 25, 2023, <https://www.washingtonpost.com/world/2022/03/07/south-korea-presidential-election-candidates/>.

¹³ Amy Gunia, “How South Korea’s Yoon Suk-Yeol Capitalized on Anti-Feminist Backlash to Win the Preside,” *Time*, last modified 2022, <https://time.com/6156537/south-korea-president-yoon-suk-yeol-sexism/>. (10/01/2023, 14.31 WIB)

¹⁴ Haeryun Kang, *Opinion: How South Korea’s ‘anti-feminist’ election fueled a gender war*, *The Washington Post*. Diakses dalam <https://www.washingtonpost.com/opinions/2022/03/12/south-korea-election-yoon-suk-yeol-anti-feminism-gender-wars/> (01/04/2022, 11.00 WIB)

memunculkan banyak protes dari kaum feminis sekaligus kabar buruk bagi keberlangsungan kesetaraan gender di Korea Selatan.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana cara Yoon Suk-Yeol dalam kampanye pemilu di Korea Selatan yang menggunakan narasi anti-feminisme untuk menarik suara masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan membantu menjawab ancaman kesetaraan gender di Korea Selatan melalui janji kampanye anti-feminisme yang dibuat oleh presiden terpilih yaitu Yoon Suk-Yeol.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian peneliti pada latar belakang, maka rumusan masalah yang penulis akan teliti adalah “Bagaimana strategi kampanye Yoon Suk-Yeol pada pemilu tahun 2022 yang mendukung kaum anti-feminis?”

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi nyata perempuan di Korea Selatan beserta ancaman untuk kesetaraan gender di Korea Selatan setelah dilaksanakan pemilu pada tahun 2022 yang dimenangi oleh Yoon Suk-Yeol seorang tokoh konservatif dengan kampanye anti-feminisme.

1.3.2 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini yaitu untuk menambah pengetahuan dalam memberikan informasi terkait dengan topik dan isu yang dibahas yang relevan dengan fokus kajian di dalam wacana Hubungan Internasional. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi secara akademik dalam pengaplikasian teori Sara Mills dalam menganalisis wacana secara kritis.

1.3.3 Manfaat Praktis

Penulis berharap penelitian ini bisa digunakan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dan bisa menjadi bahan pertimbangan para pemimpin negara dalam menentukan arah kebijakan sehingga bisa menciptakan kesejahteraan bagi seluruh masyarakatnya.

1.4 Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa literatur dari penelitian sebelumnya dengan topik yang serupa untuk dijadikan bahan rujukan serta acuan untuk penulis dalam menentukan posisi penulisan serta mencari kebaruan dari penelitian ini agar tidak ada kesamaan.

Literatur pertama jurnal dari Kardina dan Anisa Marlinda Yurisa berjudul *“Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi CEDAW pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan”* berhasil menjelaskan bahwa kekerasan berbasis gender di Korea Selatan disebabkan oleh tertutupnya masyarakat tentang perempuan dan belenggu patriarki. Pengaruh ajaran konfusianisme juga melanggengkan budaya patriarki dalam struktur sosial Korea Selatan dengan membedakan tugas dan peran laki-laki atau perempuan. Ajaran konfusianisme menempatkan laki-laki lebih tinggi otoritasnya dari perempuan sehingga banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan di Korea Selatan.

Penelitian ini menggunakan Teori Kepatuhan yang membuktikan bahwa Korea Selatan mematuhi hukum internasional dengan meratifikasi CEDAW dan menaturalisasikannya ke dalam Undang-Undang serta membentuk Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga, kemudian terdapat teori feminist radikal yang menjelaskan bahwa patriarki yang bersumber dari ajaran konfusianisme

memberikan dampak buruk bagi keberlangsungan hidup laki-laki dan perempuan di Korea.¹⁵

Persamaan penelitian ini dengan penulis yaitu sama-sama membahas tentang kekerasan seksual di Korea Selatan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada pendekatan dimana penelitian penulis akan menggunakan analisa idiosinkretik dan melihat ancaman untuk keberlangsungan perjuangan feminisme yang menginginkan terciptanya kesetaraan gender serta meminimalisir kasus kekerasan seksual di masa kepemimpinan Yoon Suk-Yeol.

Literatur kedua jurnal dari Felon Prista Oktamala dan Asnath Niwa Natar berjudul “*Kekerasan Terhadap Perempuan di Balik Industri Hiburan*” berhasil menjelaskan sisi buruk dari dunia industri hiburan Korea Selatan yang ternyata mengambil otoritas individu idol untuk dikontrol penuh oleh agensi. Alhasil menimbulkan *cyber culture* dimana tubuh perempuan menjadi alat bagi kapitalis bisa menjual produknya dengan penampilan ideal di ruang publik. Meningkatnya *cyber bullying* yang beresiko pada tindakan bunuh diri karena pelecehan seksual atau tekanan standar sosial. Jurnal ini berhasil membahas bahwa industri K-pop tidak hanya menjual suara para idolnya tetapi melakukan eksploitasi lebih jauh seperti menjual para tubuh atau benda yang berkaitan dengan idol tersebut. Standar kecantikan yang sangat tinggi di Korea Selatan juga menimbulkan banyak peristiwa bunuh diri dari kalangan *public figure* akibat dari depresi, pelecehan seksual, bullying, dsb. Terdapat *will to live* dan *will to power* antara pemilik modal dengan

¹⁵ Kardina, Anisa Marlinda Yurisa, *Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi Cedaw pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan*, Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO, Volume 1, Nomor 2, Juli-Oktober 2021, hal. 168

industri hiburan yang menjadikan perempuan sebagai sasaran empuk para laki-laki. Secara teologis, maka dibutuhkan peran gereja untuk bisa mengantisipasi, menolong, bahkan menanggulangi kasus kekerasan karena hakikatnya baik laki-laki maupun perempuan diciptakan dengan derajat yang sama.¹⁶

Penelitian ini menggunakan metode kritik-budaya dengan menggunakan analisa kritis terhadap budaya yang dipercaya oleh sekelompok orang dan memberi dampak kepada orang yang bersangkutan yang kemudian direfleksikan kepada aspek teologis. Permasalahannya masih tetap sama yaitu melihat bagaimana kekerasan seksual terjadi di Korea Selatan tetapi sudut pandang dalam penelitian ini berbeda karena penulis akan meneliti faktor idiosinkretik presiden terbaru Korea Selatan yang mengancam proses kesetaraan gender di Korea Selatan.

Literatur ketiga skripsi oleh Nur Fajria Yulianti berjudul "*Dinamika Peran Wanita Korea Pada Zaman Joseon dan Modern Ditinjau Dari Konfusianisme*" berhasil menjelaskan bahwa ajaran konfusianisme pada masa kerajaan Joseon membawa pengaruh pada segala aspek kehidupan masyarakatnya. Sistem patriarki pada era itu sangat tinggi dimana perempuan harus mengurus keluarga, akses pendidikan yang sulit bagi perempuan, dan peraturan tentang tata krama yang sangat banyak dalam ajaran konfusianisme.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan jika terdapat perubahan peran perempuan dimana pada era dinasti Joseon sulit mendapatkan akses pendidikan, maka di era modernisasi abad 21 perempuan Korea Selatan memiliki kesempatan

¹⁶ Felony Prista Oktamala, Asnath Niwa Natar, *Kekerasan Terhadap Perempuan di Balik Industri Hiburan*, Jurnal Teologi Kontekstual Indonesia, Vol. 1, No.2 (2020), hal. 124

yang sama baik dalam bidang ekonomi ataupun pendidikan. Tetapi hal ini tidak membuktikan hilangnya budaya patriarki karena Korea Selatan tetap mengalami kekerasan atau diskriminasi berbasis gender terhadap perempuan berupa ketimpangan dalam upah bekerja, bahkan perubahan peran perempuan dari era dinasti ke era modern menimbulkan banyak permasalahan seperti rendahnya angka kelahiran bayi. Perubahan yang menimbulkan dampak negatif ini dinilai karena masih kuatnya ajaran konfusianisme masyarakat budaya Korea Selatan meskipun Korea Selatan sudah menjadi negara besar di Asia Timur.¹⁷

Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran feminisme dan konsep gender untuk menganalisis fenomena sosial yang terjadi dan digunakan untuk mendefinisikan sebuah gerakan dalam perjuangan hak-hak kaum perempuan. Penelitian terdahulu ini bermanfaat untuk melihat bagaimana budaya patriarki bisa terbentuk dan masih belum bisa dihapuskan di Korea Selatan. Perbedaan dalam penelitian ini pun terletak dari perbedaan era saat dinasti Joseon dan era Yoon Suk-Yeol yang akan datang. Sehingga penelitian ini bisa dijadikan acuan sebagai dalam melihat perjuangan kesetaraan gender di era dinasti Joseon dan ancaman untuk kesetaraan gender di era Yoon Suk-Yeol.

Literatur ke empat jurnal oleh Ira Kaestiningtyas, Anaziah Safitri, Ghina Fadhillah Amalia berjudul “*Representasi Gender Inequality dalam Film Kim Ji-Young, Born 1982 (Analisis Wacana Kritis Sara Mills)*” menjelaskan bahwa isu gender yang menjadi topik sensitif di Korea Selatan diangkat ke layar lebar dengan

¹⁷ Nur Fajria Yulianti, *Dinamika Peran Wanita Korea Pada Zaman Joseon dan Modern Ditinjau Dari Konfusianisme*, Skripsi, Depok: Jurusan Bahasa dan Kebudayaan Korea, Universitas Indonesia, hal. 60-62

film berjudul *Kim Ji-Young, Born 1982*. Film ini secara garis besar menunjukkan bahwa perempuan di Korea Selatan seringkali mengalami diskriminasi akibat ketidaksetaraan gender. Film sebagai media massa dipilih untuk menyampaikan kepada publik tentang kondisi realitas sosial terkait isu gender di Korea Selatan.

Hasil penelitian ini berhasil mengupas setiap adegan yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sebenarnya dimana perempuan memiliki posisi yang lemah dan dijadikan sebagai objek akibat dari sistem patriarki yang ada. Terdapat stereotipe terhadap perempuan dimana seluruh pekerjaan domestik hanya dikerjakan oleh perempuan karena dianggap tidak kompeten untuk bekerja. Kemudian terjadinya marginalisasi terhadap perempuan terutama bagi perempuan yang sudah menikah karena akan mengganggu kemampuan dalam bekerja yang bisa berdampak kepada kemiskinan beralasan gender. Lalu, ada posisi sub-ordinal dalam dunia pekerjaan dimana laki-laki memiliki wewenang untuk mengambil keputusan dalam perusahaan ataupun posisi yang strategis dibandingkan dengan perempuan yang kurang diapresiasi dalam pekerjaannya serta rendahnya kedudukan wanita dalam pekerjaan. Kemudian ada peran ganda yang harus ditanggung oleh perempuan Korea Selatan selain mengurus keluarga yaitu bekerja untuk membantu perekonomian. Film ini menunjukkan bahwa diskriminasi terhadap perempuan bisa hadir dalam berbagai sektor baik ekonomi, pendidikan, politik, dan sosial budaya. Maka, film ini diproduksi untuk mengedukasi dan mempersuasif masyarakat agar lebih bijak dalam memperlakukan perempuan.¹⁸

¹⁸ Ira Kaestingtyas, Anaziah Safitri, Ghina Fadhilah Amalia, *Loc Cit.*, hal. 59

Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis oleh Sara Mills untuk menganalisis tampilan aktor dalam teks dan identifikasi audiens dalam penceritaan teks tersebut serta untuk melihat bagaimana kondisi masyarakat yang terjadi saat itu jika dikonteskan dari film yang terbuat berdasarkan realitas sosial. Kesamaan dengan penelitian ini yaitu membahas tentang isu kesetaraan gender sedangkan perbedaan penelitian terletak pada pendekatan yang digunakan karena akan lebih fokus kepada ancaman yang akan datang untuk kondisi kesetaraan gender paska kemenangan presiden Yoon Suk-Yeol ditinjau melalui faktor idiosinkretiknya.

Literatur ke lima jurnal oleh Oktavia Widya Kumalasari dan Hamdan Nafiatur Rosyida berjudul “*Upaya Korea Women’s Assosiation United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Ranah Politik Korea Selatan*” berhasil menjelaskan bahwa terdapat berbagai upaya untuk mendukung kesetaraan gender salah satunya adalah dengan adanya organisasi *Korea Women’s Association United* (KWAU) yang memiliki peran untuk meningkatkan posisi perempuan baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan politik.

Penelitian ini berhasil menemukan faktor rendahnya kesetaraan gender dalam politik Korea Selatan yaitu karena budaya patriarki dari ajaran konfusianisme yang memposisikan perempuan sebagai sub-ordinat nya sehingga banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan. Maka, KWAU sebagai *civil soicety* hadir untuk melakukan lobi politik seperti menduduki bangku anggota perwakilan untuk memperjuangkan aspirasi perempuan, serta melobi pemerintah agar merevisi kebijakan yang berkaitan dengan hak perempuan atau kesetaraan

gender. Tidak hanya melobi pemerintah, KWAU juga melakukan pengawasan terhadap partai politik, serta kebijakan yang dibuat dari para pemegang kekuasaan.¹⁹

Penelitian ini menggunakan pendekatan *civil society* dan *women's empowerment*. Relevansi dengan penelitian ini terletak pada terdapat kesamaan pembahasan tentang upaya apa saja yang sudah dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan gender di Korea Selatan, tetapi yang menjadi berbeda adalah ancaman untuk kesetaraan gender yang sedang diperjuangkan dalam masa kepemimpinan Yoon Suk-Yeol sebagai presiden terbaru Korea Selatan yang anti-feminisme.

Literatur ke enam skripsi oleh Eka Safitri Minabari berjudul “*Strategi Gerakan #MeToo Dalam Melawan Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Korea Selatan*” menjelaskan bahwa gerakan #MeToo di Korea Selatan diprakarsai oleh warga biasa saja dan muncul dari kondisi perempuan Korea Selatan yang kerap kali menjadi korban pelecehan seksual. Gerakan ini digunakan untuk mengungkap kasus pelecehan seksual di sekolah, pelecehan seksual di ruang publik dengan kamera tersembunyi, dan melakukan protes terkait dengan budaya patriarki. Munculnya gerakan *civil society* dalam masa kepemimpinan Moon Jae-in direspon oleh Moon Jae-in dengan meningkatkan masa hukuman bagi pelaku kekerasan seksual dari 5 tahun menjadi 10 tahun.²⁰

Hasil penelitian ini juga menjelaskan strategi yang digunakan dalam gerakan #MeToo yaitu *visibility* dengan melakukan kampanye melalui sosial media

¹⁹ Octavia Widya Kumalasari, Hamdan Nafiatur Rosyida, *Upaya Korea Women's Assosiation United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender di Ranah Politik Korea Selatan*, Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora, Vol. 6 Nomor 1, Pebruari 2022, hal. 297

²⁰ Eka Safitri Minabari, *STRATEGI GERAKAN #METOO DALAM MELAWAN TINDAKAN KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI KOREA SELATAN*, Skripsi, Malang: Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, hal. 80

agar bisa dilihat dan diakses langsung oleh masyarakat. Kemudian strategi *audibility* dengan memanfaatkan radio atau TV untuk memperluas gerakan dan kampanye agar bisa diakses secara langsung oleh masyarakat. Strategi *lobbying* untuk memengaruhi pemerintah dalam membuat kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual dan menghasilkan pengesahan sebagian Undang-Undang untuk menguatkan payung hukum pelanggaran seksual. Terakhir yaitu strategi *networking* dengan melibatkan pihak ketiga seperti organisasi internasional dan nasional agar bisa dilakukan lebih dari satu kelompok saja.

Perbedaan antara penelitian terdahulu ini terletak kepada rentang waktu yaitu tahun 2018-2021 dimana Korea Selatan saat itu dipimpin oleh Moon Jae-in sedangkan penelitian dari penulis akan meneliti keadaan kesetaraan gender di Korea Selatan di bawah kepemimpinan Yoon Suk-yeol. Relevansi penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu bisa menjadi acuan dalam melihat respon dan pengambilan keputusan antara Moon Jae-in dengan Yoon Suk-yeol terkait isu kesetaraan gender dan melihat bagaimana ancaman yang akan datang bagi kelompok gerakan ini dengan munculnya pemimpin Yook Suk-yeol sebagai anti-feminisme.

Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No	Judul dan Nama Peneliti	Jenis Penelitian dan Alat Analisa	Hasil
1	Jurnal: Analisis Gender Based Violence dalam Konvensi Cedaw pada Isu Kekerasan Seksual di Korea Selatan	Deskriptif. Konsep Feminisme Radikal, Konsep Kepatuhan, dan	<ul style="list-style-type: none"> Desakan organisasi perempuan terhadap pemerintah yang hanya ingin menjalankan Pasal 9 poin c, d, e, g di bawah Pasal 16 ayat 1 pada CEDAW yang kemudian diresevasi menjadi semua pasal di CEDAW.

	Oleh: Kardina, Anisa marlinda Yurisa	Kekerasan Berbasis Gender	<ul style="list-style-type: none"> • Pasal 16 ayat 1c, 1d, 1e dalam CEDAW sudah diadaptasi ke dalam <i>Family Litigation Act</i> pada 31 Desember 1990 dan terakhir diamandemen pada 21 Desember 2007. • Desakan perempuan Korea Selatan kepada pemerintah untuk memasukan <i>Criminal ACT</i> untuk memberi perlindungan kepada perempuan. • Kepercayaan konfusianisme menyebabkan kekerasan berbasis gender dan budaya patriarki tercipta karena terdapat perbedaan peranan antara laki-laki dan perempuan. • Prinsip non-diskriminatif CEDAW bertolak belakang dengan ajaran konfusianisme Korea Selatan. • Kekerasan seksual di korea terjadi karena kemajuan industri dan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan laki-laki dan perempuan harus bersaing.
2	Jurnal: Kekerasan Terhadap Perempuan di Balik Industri Hiburan Oleh: Felony Prista Oktamala & Asnath Niwa Natar	Metode: Kritik-budaya	<ul style="list-style-type: none"> • Industri K-Pop memiliki peraturan yang sangat ketat bahkan mengatur urusan private idolnya termasuk hubungan percintaan sampai dilatih secara keras dan diet untuk menjaga penampilan. • Budaya patriarki menempatkan perempuan dalam industri K-pop sebagai objek sehingga eksploitasi dilakukan dengan menjual suara idol, bahkan tubuh atau barang yang berkaitan dengan idol tersebut. • Persaingan yang ketat, standar sosial yang tinggi, serta tuntutan dari pemilik modal membuat tingginya angka bunuh diri dalam industri K-pop karena depresi, bullying, atau tindakan pelecehan seksual.
3	Skripsi: Dinamika Peran Wanita Korea Pada Zaman Joseon dan	Kualitatif deskriptif dan wawancara secara terbuka.	<ul style="list-style-type: none"> • Konfusianisme era dinasti Joseon tidak memberikan kemudahan bagi perempuan untuk

<p>Modern Ditinjau dari Konfusianisme</p> <p>Oleh: Nur Fajri Yuliantini</p>	<p>Pendekatan: Feminisme, Konsep Jender, Konfusianisme di Korea</p>	<p>mendapatkan akses pendidikan karena pendidikan bagi perempuan hanya berpusat dari keluarga dan pendidikan informal di rumah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perempuan diatur dengan ketat termasuk dalam memilih bahasa dalam berbicara, harus menjaga kelembutan, tidak boleh berantakan saat makan, apabila berkunjung ke rumah orang lain tidak boleh membuat kegaduhan, tidak boleh bersandar ke tembok saat sedang berdiri, tidak boleh duduk bersila, dan banyak lainnya. • Dalam ajaran konfusianisme perempuan memiliki tiga fase yaitu fase menantu, fase ibu rumah tangga dan fase ibu mertua. Sebagai menantu, perempuan harus mengabdikan dirinya untuk melayani dan menyenangkan orang tua suaminya. Dalam fase ibu rumah tangga, perempuanlah yang harus mengasuh dan membesarkan anak. Di fase sebagai ibu mertua, mereka mengajarkan kebudayaan yang sudah ada di keluarganya dan membantu menantu untuk menyiapkan makanan. • Di era dinasti Joseon perempuan memiliki pekerjaan seperti wanita penghibur yang bekerja untuk birokrat bangsawan atau pasukan perbatasan, perempuan bekerja sebagai shaman atau pemanggil arwah dewa dan mengusir roh-roh jahat, bekerja sebagai tabib, dan peran perempuan sebagai dayang istana yang mengabdikan dirinya untuk keluarga kerajaan. • Globalisasi dan kemajuan teknologi mengubah peran perempuan di Korea Selatan yang lebih mengutamakan rasionalitas dan kebebasan berpikir sehingga timbulah paham feminisme yang ingin menghapuskan perbedaan antara perempuan dan laki-laki. didirikannya Universitas Wanita Ewha juga
---	---	---

			<p>mendorong perempuan untuk mendapatkan akses kepada pendidikan. Bahkan dalam era modern, perempuan Korea Selatan turut berpartisipasi dalam bidang ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Terdapat permasalahan baru akibat partisipasi perempuan Korea Selatan di ranah publik seperti rendahnya tingkat fertilitas di Korea Selatan karena biaya hidup yang mahal, tingginya tingkat perceraian, dan munculnya fenomena bapak rumah tangga yang diyakini menyimpang dari ajaran konfusianisme. • Beberapa upaya juga dilakukan oleh pemerintah seperti mendirikan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga di Korea Selatan membuktikan bahwa pemerintah mendukung kesetaraan gender serta menghadirkan Sistem Registrasi Keluarga sehingga garis keturunan tidak lagi diambil dari ayah tetapi dari ibu juga diperbolehkan.
4	<p>Jurnal: Representasi Gender Inequality dalam Film Kim Ji-Young, Born 1982 (Analisis Wacana Kritis Sara Mills)</p> <p>Oleh: Ira Kaestiningtyas, Anaziah Safitri, Ghina Fadhilah Amalia</p>	<p>Deskriptif kualitatif.</p> <p>Pendekatan: Analisis wacana kritis oleh Sara Mills.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis wacana kritis Sara Mills membantu audiens untuk menemukan sudut pandang ideologi patriarki dan memberi arti feminitas. Hal ini dibuktikan dengan adanya adegan dengan stereotipe yang menunjukkan bahwa perempuan lebih cocok untuk di rumah saja dan peristiwa ini menunjukkan bahwa patriarki akan menempatkan perempuan untuk melaksanakan tugas domestik. Kemudian marginalisasi akibat dampak ekonomi memberi tahu publik bahwa ketimpangan gender dirasakan oleh perempuan yang sudah menikah karena lebih susah mencari pekerjaan. Lalu, sub-ordinal yang menyuguhkan kondisi realitas dimana posisi perempuan dalam pekerjaan selalu dianggap rendah dan laki-laki selalu memiliki otoritas untuk mengambil keputusan dalam pekerjaan. Terdapat beban ganda yang diberikan

			<p>kepada perempuan di Korea Selatan karena budaya patriarki yang membuat perempuan harus melakukan pekerjaan domestik dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan ekonomi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Film digunakan sebagai alat komunikasi untuk menyebarluaskan isu gender di Korea Selatan, film juga digunakan sebagai edukasi, informasi dan persuasif untuk memperlihatkan kondisi realitas perempuan di Korea Selatan yang kerap menerima perlakuan tidak adil berdasarkan gender.
5.	<p>Jurnal: <i>Upaya Korean Women's Assosiation United Dalam Memperjuangkan Kesetaraan di Ranah Politik Korea Selatan</i></p> <p>Oleh: Oktavia Widya Kumalasari dan Hamdan Nafiatu Rosyida</p>	<p>Kualitatif.</p> <p>Pendekatan: <i>Civil society dan Women's empowerment</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> • Rendahnya kesetaraan gender di Korea Selatan disebabkan oleh ideologi patriarki yang tertanam kuat di lingkungan masyarakatnya, sistem patriarki yang didapat melalui paham konfusianisme menyebabkan perempuan dianggap rendah dan selalu menggantungkan kehidupannya kepada laki-laki, tidak hanya itu konfusianisme juga memiliki kriteria bahwa idealnya pemimpin adalah mereka yang kuat, tegas, berwibawa, berpegang teguh kejujuran, keadilan, bertanggung jawab, terpercaya dan cekatan kemudian kriteria tersebut lebih cocok untuk seorang laki-laki daripada perempuan. sehingga perempuan tidak memiliki kebebasan dalam mengambil maupun membuat keputusan. • KWAU sebagai <i>civil society</i> melakukan beberapa upaya untuk mewujudkan kesetaraan gender, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. As representative, mengambil peran dalam perwakilan untuk memperjuangkan aspirasi perempuan b. As advocate, sebagai pembela kepentingan-kepentingan perempuan agar terciptanya keputusan yang sesuai dengan kepentingan bersama

			<p>c. As defines of standart, berperan sebagai penyedia norma, aturan, kebijakan, dan undang-undang sehingga KWAU terlibat langsung dalam proses pembuatan kebijakan</p> <p>d. As citizenship champion, menyediakan ruang publik untuk masyarakat agar aspirasi atau tanggapan masyarakat bisa terwadahi</p> <p>e. As solidarity supporter, berupaya untuk meningkatkan solidaritas agar mencapai kesamaan tujuan, visi, misi, dan cita-cita sehingga perjuangan mewujudkan kesetaraan gender semakin kuat</p> <p>f. As watchdog, berupaya untuk menegakkan kesetaraan gender melalui pengawasan terhadap partai politik selama proses pemilu</p> <ul style="list-style-type: none"> • KWAU melakukan pendekatan dengan masyarakat untuk menumbuhkan kesadaran tentang hak-hak perempuan dan mengikis sistem patriarki yang ada di masyarakat.
6	<p>Skripsi: Strategi Gerakan #MeToo Dalam Melawan Tindakan Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan di Korea Selatan</p> <p>Oleh: Eka Safitri Minabari</p>	<p>Deskriptif.</p> <p>Pendekatan: Konsep <i>Global Civil Society</i> dan Konsep Kekerasan Seksual</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gerakan #MeToo yang muncul pada tahun 2018 merupakan respon dari kondisi realitas Korea Selatan yang sering terjadi pelecehan seksual. Terdapat beberapa strategi yang digunakan dalam gerakan ini yaitu: <ul style="list-style-type: none"> a. Strategi <i>visibility</i>, yaitu dengan cara melakukan kampanye atau demonstrasi melalui narasi tertentu dengan media cetak seperti surat kabar, poster, atau brosur. Pada strategi ini juga memanfaatkan media sosial agar gerakan tersebut bisa dijangkua dengan langsung oleh masyarakat. b. Strategi <i>audability</i>, yaitu dengan memanfaatkan media audio seperti radio atau televisi agar aspirasi yang sedang ddiperjuangkan bisa didengar oleh masyarakat secara langsung.

		<p>c. Strategi <i>lobbying</i>, yaitu dengan cara duduk bersama pemerintahan untuk melakukan negosiasi agar mencapai kesepakatan bersama</p> <p>d. Strategi <i>networking</i>, yaitu dengan menjalin hubungan dengan organisasi nasional maupun internasional untuk aksi kolektif yang dilakukan lebih dari satu kelompok.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Di era Moon Jae-in, gerakan ini menyita perhatiannya dan Ia memberikan dukungan untuk penghapusan kekerasan seksual serta diskriminasi terhadap perempuan dan mengajak para masyarakatnya untuk menghilangkan budaya tersebut. Disamping itu, Moon Jae-in juga menambahkan masa hukuman terhadap pelaku tindakan kriminal seksual dari penjara selama 5 tahun menjadi 10 tahun.
--	--	--

1.5 Landasan Konseptual

1.5.1 Konsep Komunikasi Politik

1. Komunikasi Politik

Komunikasi politik ialah penyampaian pesan yang dilakukan antar aktor baik itu individu ataupun kelompok. Komunikasi politik biasanya dilakukan oleh partai politik untuk mentransfer sekaligus menerima umpan balik terkait isu-isu politik yang ada. Isu politik tersebut berupa ideologi partai, latar belakang partai, visi dan tujuan jangka panjang partai, dan masalah-masalah yang diungkapkan.

Ada beberapa pendapat dari beberapa sarjana politik, salah satunya ialah Nimmo. Secara definisi, ia menjabarkan politik sebagai kegiatan kolektif yang mengatur perilaku mereka di dalam kondisi konflik sosial. Perbedaan tersebut

seperti kebutuhan, cita-cita, inisiatif, perilaku dan sebagainya. Lebih lanjut ia menjabarkan bahwa perbedaan tersebut merangsang argumen, perselisihan, dan perdebatan. Dan untuk menyelesaikan perbedaan tersebut dilakukan secara serius, itulah kegiatan politik.²¹ Secara sederhana, komunikasi politik adalah suatu komunikasi yang melibatkan pesan-pesan politik dan aktor-aktor politik atau berkaitan dengan kekuasaan, pemerintahan dan kebijakan pemerintah. Artinya komunikasi politik terjadi antara “yang memerintah” dan “yang diperintah”.²²

Kegunaan dari komunikasi politik untuk menghubungkan pikiran politik antara sektor kehidupan politik masyarakat dengan sektor kehidupan politik pemerintah. Hal inilah membuat pikiran, ide, atau upaya untuk mencapai pengaruh perlu komunikasi. Sebaik apapun ide atau pikiran dan kebijakan yang dirumuskan tidak akan diterima ketika tidak ada yang menyampaikan dan menerimanya. Proses tersebutlah dikatakan sebagai komunikasi politik.²³

2. Unsur-unsur Komunikasi Politik

★ Untuk melakukan komunikasi politik harus memperhatikan unsur-unsur di dalamnya, antara lain yaitu komunikator politik, komunikan, dan isi komunikasi (pesan-pesan) media komunikasi, efek, dan sumber komunikasi.²⁴ Tiap unsur pun memiliki fungsi yang jelas untuk mencapai kepentingan.

a. Komunikator Politik

²¹ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik, Khayalak, Dan Efek* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1989), hal. 108.

²² Asep Setiawan, *Komunikasi Politik* (Jakarta: Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2018).

²³ Dan Nimmo, *Komunikasi Politik Komunikator, Pesan, Dan Media*, 5th ed. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011).

²⁴ Teuku May Rudy, *Komunikasi Dan Humas Internasional* (Bandung: Refika Aditama, 2005), hal 3.

Komunikator politik sebagai individu-individu yang berperan sebagai aktor dalam suatu asosiasi, institusi, partai politik, lembaga-lembaga media massa dan tokoh-tokoh masyarakat. Komunikator ialah seseorang yang bertugas untuk menyampaikan pesan kepada orang banyak untuk mencapai kepentingan. Karena komunikator sebagai penyampai pesan, maka komunikator berada dalam struktur kekuasaan. Hal ini disebabkan merekalah yang mengelola, mengendalikan lalu lintas transformasi pesan-pesan komunikasi dan juga dapat menentukan kebijaksanaan nasional.

Komunikator yang berada dalam struktur kekuasaan tersebut dicirikan sebagai elit berkuasa. Sedangkan yang tidak duduk pada struktur kekuasaan-kekuasaan disebut elit masyarakat. Jumlah elit masyarakat paling besar jumlahnya karena berada dalam berbagai asosiasi kemasyarakatan yang berhubungan dengan seluruh kehidupan.²⁵

b. Komunikasikan

Komunikasikan dapat diartikan sebagai seseorang atau sekelompok orang yang menerima pesan dari komunikator. Pesan yang diterima dapat berupa berita, informasi, ataupun hasutan melalui bentuk lambang-lambang yang mengandung arti dan mudah dipahami oleh komunikasikan.²⁶

c. Isi Pesan

²⁵ Dedy Mulyana, *Ilmu Komunikasi* (Bandung: PT Rosda Karya, 2010).

²⁶ Ibid, Hal 7.

Isi pesan yang terkandung merupakan sebuah propaganda massa luas yang telah disusun untuk mempengaruhi psikologi massa. Isi pesan merupakan produk dari penguasa yang diformulasikan kedalam simbol-simbol sesuai keinginan dari komunikator. Pada dasarnya isi komunikasi terdiri dari:

- 1) Seperangkat norma yang mengatur lalu lintas transformasi pesan.
- 2) Panduan dan nilai-nilai idealis yang tertuju untuk mempengaruhi komunikan.
- 3) Berisikan metode dan cara pendekatan dalam menyampaikan pesan.
- 4) Motivasi untuk memberikan dorongan dasar yang memicu pada kualitas hidup bangsa

d. Media Komunikasi

Dalam sistem politik yang berkembang sekarang, media komunikasi digunakan untuk mempropagandakan isi pesan. Maka media komunikasi adalah wadah yang sangat penting sebagai alat untuk mendapatkan legitimasi rakyat sekaligus representasi kekuasaan melalui pesan-pesan yang disampaikan. Media komunikasi dapat berupa media sosial maupun media massa.

e. Efek komunikasi

Efek adalah sebuah hasil atas penerimaan pesan atau informasi yang disampaikan oleh komunikan. Dapat diartikan juga sebagai pengaruh atau kesan yang timbul setelah komunikan menerima pesan. Efek ini biasanya disebut dengan *feedback* atau umpan balik yang berupa respon baik itu tanggapan ataupun jawaban.

Proses tersebut merupakan cara untuk memperoleh kesepakatan bersama.²⁷

²⁷ Dan Nimmo, *Op. Cit.*, hal 110.

1.5.2 Critical Discourse Analysis Sara Mills

Landasan konseptual penelitian ini menggunakan *critical discourse analysis*). Wacana ini ialah sebuah studi tentang memahami struktur pesan dalam sebuah komunikasi. Atau dapat dikatakan sebagai aneka fungsi bahasa yang dimaksudkan untuk mencari tahu variabel-variabel sosial dan ideologis dari bahasa atau beberapa sistem representasi lain misalnya film dan sebagainya.

Salah satu dari sekian banyak model analisis wacana yang ada saat ini, model Sara Mills merupakan model analisis wacana yang menempatkan dasar perhatian utama pada wacana tentang feminisme. Sara Mills menempatkan representasi sebagai bagian terpenting dari analisisnya seperti suatu pihak, kelompok, orang, gagasan, atau peristiwa yang sengaja ditampilkan dengan cara tertentu dalam wacana yang mempengaruhi konstruksi khalayak umum.

Di dalam model analisisnya, Sara Mills lebih menekankan pada bagaimana posisi-posisi aktor yang ditampilkan dalam narasi. Maksud posisi-posisi ini ialah yang menjadi subjek penceritaan dan siapa yang menjadi objeknya yang nantinya akan menentukan struktur teks dan bagaimana makna diberlakukan dalam teks secara keseluruhan.

1. Posisi Subjek-Objek

Analisis posisi aktor dalam kampanye Yoon Seok-Yeol yang mempropaganda luas bagaimana pengaruh dan kepercayaan dominan bekerja dalam bahasa yang digunakan. Posisi sebagai subjek atas objek dalam suatu representasi mengandung ideologi tertentu. Pertama, posisi ini menunjukkan batas tertentu sudut pandang kronologi. Artinya menunjukkan pada sebuah peristiwa atau

wacana yang akan dijelaskan dalam sudut pandang subjek sebagai narator dari suatu peristiwa.

Kedua, sebagai subjek representasi narator bukan hanya memiliki keleluasaan dalam menceritakan peristiwa tetapi juga dapat menafsirkan sendiri berbagai tindakan yang membangun peristiwa berdasarkan pemaknaan yang disampaikan kepada khayalak. Ketiga, proses pendefinisian tersebut bersifat subjektif, maka perspektif dan sudut pandang yang dipakai tersebut akan turut berpengaruh terhadap peristiwa yang didefinisikan.²⁸

Propaganda yang dibuat Yoon Suk-yeol di kampanya menempatkan perempuan menjadi subordinat laki-laki. Yoon Suk-yeol menghapuskan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga karena memandang bahwa gender laki-laki di Korea Selatan merugikan laki-laki dalam pandangan hukum. Dalam teori Sara Milss beranggapan bahwa “pribadi itu politis” yang memiliki ungkapan bahwa masalah-masalah seputar alokasi tanggung jawab atas hak asuh anak dan pekerjaan rumah tangga pada kenyataannya sudah menjadi masalah struktural. Hal ini didukung juga dengan pernyataan Foucault yang didefinisikan ulang oleh Sara Milss yang mencoba memasukkan kembali ‘politik’ kedalam ruang privat. Dan mencoba memetakan kemungkinan strategi untuk membawa perubahan dalam sistem yang semakin kompleks.²⁹

Jika perempuan secara aktif berperan menjalankan posisi dan peran subjek mereka dalam proses diskursus sosial maupun politik terkait cara menyampaikan

²⁸ Sara Milss, *LANGUAGE AND SEXISM*, 1st ed. (Inggris: Pers Universitas Cambridge, 2008).

²⁹ Sara Mills, “DISCOURSE” (Taylor & Francis e-Library, 2003), 69–77.

gagasannya dianggap sebagai ideologis yang dipaksakan maka itu menjadikan perempuan sebagai objek penindasan yang pasif. Gagasan feminisme sebagai konstruksi sosial di Korea Selatan begitu kaku sehingga yang terjadi ialah tidak adanya kemungkinan perubahan. Justru yang terjadi malah sebaliknya yang menjadikan perempuan sebagai objek pasif. Diasumsikan bahwa stereotip feminisme adalah konstruksi yang diciptakan oleh laki-laki.³⁰

2. Posisi Pembaca

Dalam pandangan Sara Mills adalah bagaimana posisi pembaca ditampilkan dalam teks. Teks posisi pembaca sangatlah penting serta diperhitungkan. Sara Mills meletakkan dasar pikirannya tentang posisi pembaca pada teori ideologi yang dikemukakan oleh Althusser. Sara Mills beranggapan ketika perempuan secara aktif menjalankan posisi subjek dan peran mereka dapat tergambarkan pada gagasan wacana dari teori feminis sebelumnya, maka dalam kategori ideologis cenderung dipaksakan dan menempatkan perempuan sebagai korban pasif dari penindasan.

Gagasan feminitas sebagai konstruksi sosial yang begitu kaku tidak akan menunjukkan perubahan yang signifikan dalam masyarakat. Terlebih lagi dalam konteks posisi pembaca. Melihat keberlangsungan stereotipe yang terus dijalankan oleh kelompok penguasa akan selalu memosisikan perempuan sebagai objek.

Sara Mills membedah posisi pembaca melalui artikulasi kepentingan yang dilakukan oleh penguasa dalam penguasaan media. Cara tersebut dianggap sebagai

³⁰ Sara Mills, *Michel Foucault, Fifty Key Sociologists: The Contemporary Theorists*, 1st ed. (New York: Taylor & Francis e-Library, 2003).

hubungan pemaksaan kekuasaan. Selain media komunikasi yang digunakan sebagai alat mencapai kekuasaan, penguasa juga menggunakan buku-buku, poster ataupun simbol-simbol sebagai indikator derajat ketertindasan perempuan.

Dalam posisi pembaca, penguasa selalu membuat pembaca untuk sepakat dengan teks yang dibuat. Dengan maksud mempertahankan konstruksi bahwa perempuan sebagai objek. Ini merupakan perilaku untuk membentuk psikologi perempuan agar terdomestifikasi. Bagian ini merupakan indikasi fakta bahwa sastra menghadirkan daya tarik kuat bagi siapapun. Dari hal tersebutlah penguasa mampu mempengaruhi perilaku sosial.³¹

Teori ini digunakan oleh penulis untuk membedah kampanye politik Yoon Seok-yeol yang menggunakan kampanye anti-feminisme pada pemilu di Korea Selatan tahun 2022 dan berguna untuk melihat berbagai ancaman yang datang untuk keberlangsungan dari kesetaraan gender di Korea Selatan berdasarkan variabel orientasi nilai dominan di masyarakat Korea Selatan yang masih melanggengkan budaya patriarki.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif karena bersifat untuk memahami makna dari suatu kejadian atau peristiwa berdasarkan informasi yang

³¹ Mills, "DISCOURSE, *Op. Cit.* hal. 83"

didapat lalu diolah secara holistik dalam bentuk naratif.³² Maka penelitian ini dirancang untuk memperoleh dan mencari informasi yang sesuai dengan konteks kemudian dipetakan sehingga menghasilkan interaksi dari informasi berupa analisis lebih lanjut. Penelitian kualitatif juga memusatkan peneliti sebagai instrumen kunci dalam menentukan keberhasilan penelitian yang ditentukan oleh kemampuan penulis dalam mencari informasi, menghimpun, dan memaknai secara holistik. Penelitian kualitatif juga identik dengan non-numerikal karena memanfaatkan data dalam bentuk gambar atau kata-kata bukan dalam bentuk angka. Penelitian ini juga bersifat deskriptif karena hasil olahan data akan disajikan dalam bentuk naratif.³³

1.6.2 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, maka teknik pengumpulan datanya menggunakan studi dokumentasi dengan cara mencari dokumen yang relevan dengan topik dari sumber primer yang didapatkan melalui buku ataupun sumber sekunder dengan memanfaatkan website pada jurnal, artikel online, website resmi pemerintahan Korea Selatan, atau media sosial seperti *Twitter* dalam menemukan informasi-informasi yang sesuai dengan standar data yang ditetapkan.

1.6.3 Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, maka teknik analisa data yang digunakan yaitu dengan cara mengumpulkan data yang relevean dengan topik kemudian diseleksi dengan cara merangkum bagian penting dan bagian yang akan dipelajari untuk

³² Prof. Dr. A. Muri Yusuf, M.Pd., 2014, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan (ed.1)*, Jakarta: PT Fajar Interpratama Mandiri, hal. 328

³³ Mills, "DISCOURSE. *Op. Cit.*, hal. 333"

mempermudah dalam pengumpulan data-data. Kemudian disusun secara sistematis berdasarkan teori yang digunakan sebelum menciptakan sebuah kesimpulan yang akan dijabarkan dalam bentuk deskriptif dan naratif.

1.6.4 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini memerlukan ruang lingkup agar pembahasan tidak keluar dari rumusan masalah yang sudah ditetapkan. Adapun materi yang akan penulis gunakan yaitu dari masa kampanye Yoon Suk-Yeol pada pemilihan presiden 2022 di Korea Selatan dengan kampanye anti-feminismenya.

1.7 Argumen Pokok

Berdasarkan rumusan masalah dan landasan konseptual yang sudah dijelaskan di atas, maka penulis mengajukan argumen pokok bahwa Yoon Suk-yeol merupakan salah satu kandidat dari kaum konservatif *People Power Party (PPP)* yang menggunakan kampanye anti-feminisme untuk menarik suara masyarakat Korea Selatan yang tidak sepakat dengan paham feminisme. Yoon Suk-Yeol juga memiliki media komunikasi yang mendukung dirinya untuk melakukan suksesi pemilu di Korea Selatan, Tak terlepas pula dari dukungan Partai Kekuatan Rakyat yang berideologi konservatif untuk mempengaruhi masyarakat Korea Selatan agar kembali ke dalam budaya para leluhurnya. Dalam konsep Komunikasi Politik Dan Nimmo, terdapat salah satu cara Yoon Suk-Yeol untuk mempropaganda kepentingannya melalui media komunikasi kepada sasarannya. Rumusan pesan yang dikemas dan disampaikan, memiliki aktor yang handal dan sesuai dengan kriteria yang ada. Sehingga kampanyenya cukup berhasil untuk memenangkan pemilu. Jika ditinjau dengan teori Sara Milss pada variabel masyarakat terdapat

konstruksi sosial tentang paham feminisme sangat kuat sehingga kebijakan yang berkaitan dengan perempuan dianggap hanya memberikan keuntungan kepada perempuan saja. Hal ini dijadikan sebagai peluang bagi Yoon Suk-yeol untuk mendapatkan suara dari laki-laki yang merasa dirugikan dengan adanya kebijakan yang pro terhadap kesetaraan gender. Bersamaan dengan janji Yoon Suk-yeol untuk menghapuskan Kementerian Kesetaraan Gender dan Keluarga yang sudah membantu untuk melindungi banyak ibu tunggal maupun membantu menangani kasus kekerasan atau pelecehan seksual. Tidak hanya itu, presiden terbaru Korea Selatan juga menghiraukan isu ketimpangan gender yang mendapatkan banyak protes dari kaum feminisme di Korea Selatan. Terlebih lagi peran perempuan dalam politik di Korsel ada sekitar 57 orang yang berada di kursi parlemen pasca pemilu di bulan April dua tahun lalu. Namun yang terlibat dalam perumusan aturan hanya 19 persen dari 57 perempuan tersebut. Dengan narasi yang dibangun maka akan semakin menutup kesempatan perempuan untuk andil dalam pembuatan hukum. Selain itu Yoon Seok-yeol membuat narasi Anti-Feminis untuk mencapai kepentingan politiknya. Ia beranggapan bahwa feminisme sebagai penyebab rendahnya angka kelahiran di Korea Selatan. Data sensus penduduk Korsel menunjukkan sekitar 51 juta warga akan tetapi dari tahun 2019 hingga 2020 mengalami penurunan 0,1 persen menjadi 0,09 persen. Ancaman kesetaraan gender pun semakin nyata jika kedepannya keterlibatan perempuan dikurangi dalam tubuh pemerintahan Yoon Seok-yool yang anti-feminisme.

1.8 Sistematika Penulisan

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar Belakang

	<ul style="list-style-type: none"> 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Landasan Konseptual 1.6 Metodologi Penelitian 1.7 Argumentasi Pokok 1.8 Struktur Penulisan
BAB II	Dinamika Kampanye Pilpres 2022 di Korea Selatan
	<ul style="list-style-type: none"> 2.1 Profil Calon Presiden Korea Selatan 2022 2.2 Perempuan dan Politik di Korea Selatan 2.3 Isu Gender Sebagai Strategi Kampanye di Masa Sebelum Yoon Seok-Yeol
BAB III	Strategi Kampanye Yoon Suk-Yeol
	<ul style="list-style-type: none"> 3.1 Aktor Dibalik Sukses Yoon Seok-Yeol 3.2 Pesan-Pesan Kampanye Yoon Seok-Yeol 3.3 Strategi Kampanye Yoon Seok-Yeol
BAB IV	Analisa Wacana Kritis Anti-Feminisme Dalam Kampanye Yoon Seok-Yeol pada Pemilihan Presiden 2022 di Korea Selatan
	<ul style="list-style-type: none"> 3.1 Yoon Seok-Yeol Sebagai Aktor Dalam Kampanye 3.2 Ancaman Kesetaraan Gender Korea Selatan di Era Yoon Seok-Yeol
BAB V	Penutup
	<ul style="list-style-type: none"> 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran